

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Literature Review

Di dalam menyusun penelitian akhir ini penulis berupaya melakukan ulasan literatur yang terkait dan dianggap mampu menunjang penelitian tugas akhir dari penulis. Beberapa literatur diantaranya sebagai berikut,

2.1.1. Literature Review 1

Dalam Jurnal Pendidikan Islam yang ditulis oleh Saifullah Isri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul **“Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif Terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia”** (Isri, 2015), di dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai perbedaan sistem pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia dengan yang dimiliki oleh Jerman maupun Australia. Penulis jurnal tersebut memaparkan hasil penelitiannya secara terurut dan terarah mulai dari pemisahan sistem pendidikan masing masing negara, sejarah pendidikannya secara singkat yang berkembang hingga saat ini, sampai tahap evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif dan efisiennya pendidikan tersebut dapat dilaksanakan. Lebih lanjut dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Jerman dapat berkembang dengan pesat di karenakan negara Jerman belajar dari kesalahan masa lalu yaitu Perang Dunia ke 2 yang mana kekalahan perang ini memacu mental masyarakatnya untuk melahirkan generasi atau pemimpin di masa mendatang yang mampu membawa negaranya menuju

kejayaan dan kehidupan bermartabat. Belajar dari masa lalu Jerman, negara ini turut memisahkan unsur pendidikan dengan kekuatan atau kekuasaan secara politik yang bertujuan agar tidak bertumpu pada satu orang atau satu lembaga saja terlebih mengingat pengaruh Adolf Hitler di masa lalu yang begitu absolut yang membuat negara Jerman mengarah kepada kehancuran. Masalah pendidikan di Jerman sendiri bukan tanpa adanya hambatan, pada awalnya sistem pendidikan di negara ini dipengaruhi oleh dua lembaga besar yaitu negara dan agama (gereja), serta diikuti oleh beberapa pihak seperti negara bagian. Namun kebijakan wajib belajar selama 17 tahun merubah pandangan tersebut, yang awalnya tanggung jawab pendidikan berada di dua lembaga utama yaitu negara dan gereja kini beralih menjadi tanggung jawab negara. Namun untuk menghindari sentralisasi di dalam pendidikan, Undang Undang di Jerman memberikan kewenangan bagi negara bagian untuk turut serta dalam bertanggung jawab terhadap pendidikan di tingkat sekolah umum dan sekolah kejuruan, serta sekolah taman kanak kanak.

Hal yang menjadi pembeda antara sistem pendidikan di Indonesia dengan negara Jerman terletak pada fleksibilitas dan evaluasi pendidikannya. Kedua negara sama sama memiliki badan pendidikan yang dinamakan universitas, namun dalam teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan. Apabila universitas di Indonesia diatur dalam sistem per semester berupa sistem kredit semester, di negara Jerman para pelajarnya dibebaskan untuk menentukan sendiri perkuliahannya, seminar, pelatihan, hingga ujian yang akan diikuti. Situasi yang diberikan kepada pelajar universitas ini tentu saja dapat membawa dampak negatif yang besar pula seperti pelajar yang terlalu santai yang berakibat pada keterlambatan masa studi. Badan pendidikan lain yang

dimiliki oleh Jerman dinamakan Universitas Terapan, di dalam Universitas Terapan ini model pendidikannya akan mirip dengan sistem perkuliahan di Indonesia, namun yang menjadi pembeda adalah Universitas Terapan ditujukan bagi para pelajar yang ingin cepat berkarir pasca kelulusannya dan mayoritas karir yang ditawarkan akan berada di bidang riset & pengembangan, atau bidang akademik. Untuk evaluasi pendidikan sendiri Jerman tidak mengatur secara ketat seperti yang ada di Indonesia yang mana di Indonesia evaluasi pendidikan dilakukan secara terpusat melalui ujian negara. Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh negara Jerman sebagai langkah untuk mengetahui siswanya yang mengalami kesulitan belajar atau untuk menemukan potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Karena prosedur penilaian yang variatif ini, maka nilai akhir atau skor yang didapat akan bergantung pada penilaian secara individu disertai jenis tugas yang diberikan.

2.1.2. Literature Review 2

Pada literatur kedua dalam Jurnal Filsafat Indonesia yang ditulis oleh Unung Verawardina dan Jalius Jama dengan judul **“PHILOSOPHY TVET DI ERA DERUPSI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA”** (Verawardina & Jama, 2019), menjelaskan terminologi mengenai *vocation* yang dalam Bahasa Indonesia berarti kejuruan dan terminologi vokasi sendiri memiliki arti yang sama dengan pendidikan vokasi yang berarti pendidikan kejuruan. Dalam pendidikan vokasi di Indonesia yang masuk ke dalam kategori ini merupakan pendidikan setingkat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) atau pendidikan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi yakni diploma. Namun untuk TVET (Technical and Vocational Education and Training) sendiri menurut penulis dalam jurnalnya memiliki arti yang berbeda dan

lebih komprehensif, ini dikarenakan TVET merupakan pendidikan vokasional yang ditujukan selain untuk meningkatkan kemampuan pendidikan juga untuk pelatihan dalam dunia kerja. Jadi kegiatan dalam pembelajarannya tentu saja akan melibatkan pembelajaran di dalam ruangan maupun praktek secara langsung baik itu di industri maupun di tempat lain sesuai bidang keahlian yang diajarkan. Dalam jurnal penulis memaparkan bahwa secara filosofis pendidikan vokasi memiliki tiga macam tujuan yaitu Esensialisme, Pragmatis, dan Pragmatis Rekonstruksi.

Lebih lanjut mengenai filosofis tujuan pendidikan vokasi, dimulai dari tujuan secara esensialisme penulis jurnal menjelaskan bahwa TVET bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri maupun pasar yang artinya kebutuhan akan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan terorganisir menjadi nilai utama dari tujuan yang sifatnya esensialisme. Dan pengalaman serta pengajarannya pun akan diorientasikan kepada pemenuhan pengalaman terkait industri maupun bisnis. Tujuan kedua dari pendidikan vokasi yaitu secara pragmatis merupakan filosofi yang penulis anggap merupakan tujuan yang sesuai dalam penerapan TVET di masa depan, penulis beranggapan bahwa filosofi pragmatis ini menempatkan pendidikan TVET sebagai pendidikan yang dapat membantu individu dalam memenuhi atau mencapai kebutuhan dan tujuan hidupnya. Pengajaran yang bertujuan pragmatis pun diorientasikan kepada kemandirian peserta didik dengan penekanan kepada pemecahan masalah berpikir orde tinggi, dari penekanan terhadap pemecahan masalah tersebut diharapkan para peserta didik mampu untuk berpikir lebih kritis dan mampu mengatasi berbagai permasalahan di hidupnya. Tujuan yang ketiga dari filosofi pendidikan vokasi adalah pragmatis rekonstruksionis, tujuan ini merupakan bentuk lebih lanjut dari tujuan pragmatis.

Perkembangan ilmu pengetahuan beserta teknologi tentu juga harus dibarengi dengan kemampuan pola pikir manusia yang lebih kompleks, karena itulah dalam pragmatis rekonstruksionis peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kemampuan teknologi. Dalam teknis tujuan pragmatis rekonstruksionis, pengajar akan mengarahkan peserta didik untuk belajar bersosialisasi di masyarakat maupun berorganisasi di masyarakat sembari terus memperdalam pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi, ini dimaksudkan agar membentuk kemampuan kritis peserta didik dan menjadi penyeimbang penggunaan teknologi dalam masyarakat dalam hal ini adalah membantu masyarakat dalam memahami perkembangan teknologi.

Peran revolusi industri juga tidak luput dari perkembangan pendidikan vokasi, dalam revolusi industri 1.0 adalah revolusi industri dalam bidang mekanisasi alat alat produksi, berikutnya revolusi industri 2.0 adalah revolusi industri dalam peningkatan mutu produk serta produksi massal, lalu revolusi industri 3.0 adalah revolusi industri yang ditandai dengan manufaktur berbasis robotic serta penyesuaian produksi secara massal, dan yang terbaru yaitu revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri yang memanfaatkan teknologi secara virtual disertai kodifikasi teknologi teknologi lama menjadi teknologi baru yang lebih efektif dan efisien.

2.1.3. Literature Review 3

Dalam literatur ketiga adalah jurnal ilmiah yang dipublikasikan ke dalam Jurnal Online Mahasiswa ditulis oleh Titik Karomah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang berjudul **“Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Melalui Deklarasi Jakarta Tahun 2012-2016”** (Karomah, 2017). Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan alasan negara Indonesia tertarik untuk melakukan kerja sama

dengan negara Jerman adalah peningkatan nilai ekspor persenjataan dalam periode 2005-2009 mengalami peningkatan, yang artinya ada pengakuan akan kualitas persenjataan yang dimiliki oleh negara Jerman. Selain itu dalam kontrak MoU pembelian alutsista berupa MBT (Main Battle Tank) Leopard dari negara Jerman ke Indonesia adalah sebagai salah satu cara untuk menimbulkan dampak positif berupa *Transfer of Technology* (ToT) yang mana pembelian langsung dari negara produsen dapat menjadi acuan dalam pengembangan alutsista di Indonesia. Hubungan strategis dalam bidang pertahanan tersebut kemudian ditingkatkan menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman melalui penandatanganan *Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility* (Deklarasi Jakarta 2012) yang di dalamnya turut memuat bidang kerjasama strategis antara lain kerja sama Bidang Investasi dan Perdagangan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang bagian Hukum dan Konsuler, Bidang Industri Pertahanan, serta Bidang Pers. Dalam penandatanganan Deklarasi Jakarta 2012, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan kemudian diteruskan menjadi penerapan *Memorandum of Understanding on Bilateral Defense Cooperation* yang melibatkan Kementerian Keamanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Jerman.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama dalam bidang pertahanan antara Indonesia dengan Jerman ini melibatkan kerja sama dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk kerja sama dalam jangka pendek sendiri, penulis memaparkan bahwa setidaknya ada kesepakatan untuk membeli alutsista yang diantaranya adalah pembelian 180 Unit tank Leopard dan Marder dari perusahaan alutsista Rheinmetall

yang berada di Jerman dengan anggaran sebesar US\$ 280 Juta. Pembelian tank sendiri dimaksudkan Indonesia sebagai peningkatan kemampuan tempur Indonesia agar kebutuhan alutsista Indonesia dapat mencapai target *Minimum Essential Force* (MEF). Selain dari kerja sama jangka pendek antara Indonesia dan Jerman berupa pembelian tank maupun alutsista lainnya, terdapat pula kerja sama dalam jangka panjang. Transfer teknologi atau ToT adalah bentuk kerja sama jangka panjang Indonesia-Jerman dalam pengadaan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa PT. Pindad dan Rheinmetall akan melakukan pengembangan berupa pabrik amunisi untuk tank Leopard dengan kaliber sebesar 120 mm, untuk proyeksi lebih jauh dari pengembangan amunisi tank ini diharapkan Indonesia dapat menjadi sentral dari pasar industri pertahanan dan menjadi pusat kekuatan regional di Asia.

2.1.4. Literature Review 4

Dalam literatur keempat yang ditulis ke dalam Jurnal Taman Vokasi oleh Kuntang Winangun, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berjudul **“PENDIDIKAN VOKASI SEBAGAI PONDASI BANGSA MENGHADAPI GLOBALISASI”** (Winangun, 2017), menjelaskan dasar pemahaman mengenai pendidikan vokasi, model pendidikan yang bisa diajarkan secara efektif, hingga strategi pembelajaran pendidikan vokasi. Dasar pemahaman mengenai pendidikan vokasi menurut penulis adalah jenjang pendidikan yang selalu dinamis yang diakibatkan dari perubahan kurikulum yang mengikuti pertumbuhan pasar atau ekonomi serta perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam tulisannya terdapat penjelasan dari pakar yaitu Pavlova (2009), menurut pertimbangannya perkembangan

aktivitas ekonomi akan sangat dipengaruhi dari perkembangan teknologi dan pendidikan vokasi akan diarahkan pada orientasi untuk pendidikan bekerja atau pendidikan teknologi. Lebih jelasnya mengenai pendidikan bekerja dan pendidikan teknologi adalah, pendidikan bekerja adalah program pendidikan yang ditujukan untuk pemahaman serta pembelajaran sifat dasar dalam bekerja. Sementara untuk pendidikan teknologi adalah pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh peserta didik sehingga pengembangan tersebut dapat membawa manfaat dalam adaptasi pekerjaan di masa mendatang.

Pendidikan vokasi dapat dibedakan ke dalam dua model yaitu model pendidikan secara *teaching factory* yang mana model pendidikan ini dapat dimiliki oleh beberapa sekolah dan model lainnya adalah model pendidikan secara DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Meski dalam pendidikan vokasi memiliki perbedaan model pengajaran namun hasil akhir akan tetap mengacu pada Delapan Kompetensi Lulusan yaitu *Communication Skills; Critical and Creative Thinking; Information/Digital Literacy; Inquiry/Reasoning Skills; Interpersonal Skills; Multicultural/Multilingual Literacy; Problem Solving; dan Technological Skills*. Dalam poin terakhir pemaparannya, penulis juga menjelaskan bahwa dalam pendidikan vokasi juga diperlukan strategi mengajar yang efektif. Dan strategi dalam pelaksanaannya adalah melalui *learning by doing* yang cocok bagi model pendidikan vokasi baik secara *teaching factory* maupun DUDI, pembelajaran *learning by doing* ini pada akhirnya akan melalui evaluasi melalui *performance test* yang berguna untuk mengukur kemampuan ataupun kompetensi masing masing peserta didik dalam bidang keahlian tertentu.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu dan Proposisi

Bagan 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Analisis
<p>Saifullah Isri. 2015</p>	<p>Konsep Pendidikan Jerman dan Australian; Kajian Komparatif dan Aplikatif Terhadap Mutu Pendidikan Indonesia</p>	<p>Perbandingan Pendidikan, Jerman, Australia, Mutu Pendidikan</p>	<p>-</p>	<p>Pendidikan di Jerman pada awalnya dipengaruhi oleh kekuatan politis dari Gereja, dimana tujuan awalnya adalah mengentaskan permasalahan buta huruf yang dimiliki oleh penduduk Jerman pada masa lampau. Kemudian beralih ke masa kepemimpinan Adolf Hitler, pendidikan diarahkan menjadi kepentingan peperangan sehingga menjadikan Jerman negara yang terpuruk pasca kekalahan pada Perang Dunia kedua, berangkat dari kesalahan tersebut Jerman merombak total pendidikannya agar di masa depan Sumber Daya Manusianya dapat mengangkat kembali harkat dan martabat Jerman di mata dunia. Sistem pendidikan Jerman yang merdeka yang berarti siswa dapat memilih ingin bersekolah seperti apa dan pendidikan yang juga mengarah pada keahlian profesi sangat berbanding terbalik dengan sistem pendidikan di Indonesia yang bersifat sentral dan tidak sesuai dengan kebutuhan pada dunia kerja yang membutuhkan keahlian khusus</p>
<p>Unung Verawardina., Jalius Jama. 2018</p>	<p>Philosophy TVET di Era Derupsi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia</p>	<p>Philosophy TVET, Pendidikan Kejuruan, Revolusi Industri 4.0</p>	<p>Library Research</p>	<p>Terminologi mengenai Pendidikan Vokasi dan TVET (Technical and Vocational Education and Training) sama sama memiliki arti pendidikan kejuruan, akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya justru berbeda. Pada pendidikan vokasi, pendidikan hanya sebatas pada teori dan praktik kegiatan yang bersifat praktik dan tidak holistik sementara</p>

			<p>TVET justru menekankan pentingnya kegiatan praktik serta pendalaman keahlian sesuai dengan bidang kejuruan yang diambil. Karena pada dasarnya TVET ditujukan sebagai pemenuhan akan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pada industri maupun dunia kerja. Perkembangan Revolusi Industri turut serta terhadap berkembangnya TVET karena teknologi dan informasi merupakan faktor utama dalam kemajuan industri yang secara keseluruhan sudah mulai terkomputerisasi dan memiliki standar kualitas produksi.</p>
<p>Titik Karomah. 2017</p>	<p>Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Melalui Deklarasi Jakarta 2012-2016</p>	<p>Jakarta Declaration, International Relations, National Interest, Defense Cooperation, Modernization of Defense Equipments</p>	<p>Peningkatan nilai ekspor Alutsista dari negara Jerman yang meningkat serta kepentingan negara Indonesia dalam upaya mengembangkan dan memperkuat alutsista dalam negeri menjadi alasan utama mengapa negara Indonesia-Jerman melakukan kesepakatan dan kerjasama dalam bidang pertahanan. Dalam kesepakatan strategis yang tertuang dalam <i>Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility</i> (Deklarasi Jakarta 2012), Indonesia dan Jerman sepakat untuk saling berkontribusi baik itu <i>Transfer of Technology/ToT</i> maupun pembelian MBT (Main Battle Tank) dari Jerman. Untuk kerjasama pada bidang pertahanan akan dilaksanakan secara jangka panjang maupun jangka pendek, untuk jangka pendek adalah pembelian MBT (Main Battle Tank) Leopard 2/Leopard senilai US\$ 280 juta. Sementara untuk jangka panjang adalah <i>Transfer of Technology</i> pembuatan amunisi tank 120mm dengan harapan</p>

				pasar industri pertahanan dan keamanan akan bersentral di Indonesia.
Kuntang Winangun. 2017	Pendidikan Vokasi Sebagai Pondasi Bangsa Menghadapi Globalisasi	Vocational Education, Globalization	Deskriptif, Studi Kepustakaan	Dasar pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang kurikulumnya diharuskan tetap dinamis mengikuti perkembangan zaman, baik itu pertumbuhan pasar; ekonomi; ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi yang seharusnya secara umum dapat dikenali ke dalam dua model yaitu model <i>Tecahing Factory</i> dan model DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri). Perbedaan dalam model pendidikan vokasi tidak menjadikan bahwa model satu dengan yang lainnya jauh lebih baik atau lebih buruk namun kedua model tersebut akan tetap tertuju pada tujuan akhir yaitu penguasaan pada Delapan Kompetensi Lulusan yaitu Communication Skills; Critical and Creative Thinking; Information/Digital Literacy; Inquiry/Reasoning Skills; Interpersonal Skills; Multicultural/Multilingual Literacy; Problem Solving; dan Technological Skills.

Beberapa penelitian yang terdapat pada bagan 2.1 secara keseluruhan menunjukkan bahwa kehadiran pendidikan vokasional sebagai solusi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di Indonesia merupakan hal yang penting, tidak semua hasil penelitian yang ada pada bagan 2.1 membahas mengenai pentingnya pendidikan vokasional ada salah satu penelitian yang membahas tentang kerja sama strategis Indonesia dengan Jerman dalam bidang Keamanan dan Pertahanan.

Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut maka dapat dijabarkan mengapa penelitian skripsi ini dapat dikatakan sedikit berbeda dari apa yang dibahas pada penelitian terdahulu, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti secara mayoritas berbentuk dalam format jurnal ilmiah/karya ilmiah. Pemilihan format jurnal/karya ilmiah ini dimaksudkan karena ketidakterediaan bahan pembanding berupa skripsi yang memiliki tema dan pembahasan serupa dengan penelitian skripsi ini.
- Pembahasan mengenai pendidikan vokasi pada penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini sedikit berbeda dikarenakan adanya pelibatan aktor G2G (Government to Government) yaitu Indonesia dengan Jerman dalam program SED-TVET (Sustainable Economic Development through Technical & Vocational Education and Training) dan dengan periodisasi yang berbeda pula yakni 2012 hingga 2020.
- Penelitian yang menyinggung masalah tentang Hubungan Internasional mengenai kerja sama strategis yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta: 2012 pada salah satu penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi ini dikarenakan topik pembahasannya sudah berbeda dimana pada hasil penelitian terdahulu membahas Deklarasi Jakarta: 2012 pada Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional, sementara pada penelitian skripsi ini pembahasan mengenai Deklarasi Jakarta: 2012 adalah tentang pengembangan pendidikan vokasional melalui pendidikan ber-sistem ganda/TVET.

Berdasarkan proposisi yang dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara istilah tetap berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menyinggung soal Deklarasi Jakarta: 2012 akan tetapi secara topik pembahasan memiliki pembahasan yang berbeda yaitu tentang masalah Keamanan dan Pertahanan.

Dan untuk pembahasan mengenai pendidikan vokasional, pada penelitian skripsi ini akan dibahas lebih dalam mengenai pelaksanaan program SED-TVET sebagai program pengembangan mutu pendidikan vokasional di Indonesia.

2.3. Kerangka Teoritis

2.3.1. Kerja Sama Internasional

Dalam pengertiannya secara umum kerja sama internasional merupakan kerja sama yang melibatkan aktor negara baik sebagian maupun seluruh dunia. Kerja sama dilakukan selain untuk mencapai tujuan tertentu juga ditujukan untuk pencapaian kepentingan politik luar negeri suatu negara. Beberapa pakar juga turut memberikan pengertian tentang kerja sama internasional, menurut KJ Holsti dalam *International Politics: A Framework for Analysis* (1967) kerja sama internasional adalah,

...kerja sama internasional merupakan proses di antara negara negara yang saling berhubungan secara bersama sama. Dengan melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah masalah tersebut, mencari faktor faktor teknis yang mendukung jalan keluar tertentu. Mengadakan perjanjian perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Definisi kerja sama internasional menurut pakar lainnya adalah Koesnadi Kartasasmita, dalam *Administrasi Internasional* (1997) menjelaskan bahwa kerja sama internasional merupakan, “*kerja sama internasional adalah akibat dari adanya hubungan internasional dan karena bertambah kompleksnya kehidupan manusia di dalam masyarakat internasional*”.

Kerja sama internasional perlu dilakukan dengan tujuan disamping mencapai kepentingan politik luar negeri suatu negara, juga meningkatkan perekonomian negara sebagai imbas dari berbagai kerja sama di berbagai bidang, selain itu kerja sama

internasional juga turut mencegah adanya konflik dan memperlerat hubungan antar negara (Sutrisni, 2019).

2.3.2. Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri dan Diplomasi kerap kali tidak dapat dipisahkan dan beberapa orang menganggap bahwa keduanya adalah hal yang sama, nyatanya anggapan tersebut tidak tepat. Salah satu definisi mengenai politik luar negeri disampaikan oleh *Gibson* dalam bukunya yang berjudul *The Road to Foreign Policy*. Menurutnya definisi mengenai politik luar negeri adalah, “*rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. Politik luar negeri ditujukan pada peningkatan dan perlindungan kepentingan bangsa.*”

Secara aspek dinamis, politik luar negeri merupakan reaksi tindakan pemerintahan suatu negara terhadap pemerintahan negara lain yang di dalamnya turut memuat hubungan dengan negara lain disertai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Perumusan dari politik luar negeri dapat berujung fatal apabila para perumus politik luar negeri dalam hal ini adalah pimpinan eksekutif negara tidak mampu untuk menyusun politik luar negeri yang sifatnya kooperatif. Karena politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara, faktor faktor seperti kekuatan hingga kelemahan, aspirasi, maupun berbagai informasi dari negara lain dapat menjadi dasar para perumus kebijakan politik dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara. Kualitas dan keefektifan politik luar negeri suatu negara dilihat dari pelaksanaan di lapangan, hasil pelaksanaan di lapangan akan menentukan keberhasilan pencapaian kepentingan nasional suatu negara dalam hal ini yang

dimaksud dengan pelaksanaan adalah diplomasi. Jadi anggapan mengenai politik luar negeri adalah sama dengan diplomasi dianggap tidak tepat, karena politik luar negeri akan berhubungan dengan perumusan dan respon tindakan para pemangku kepentingan atau perumus kebijakan politik suatu negara. Politik luar negeri tersebut juga tentunya memerlukan tindakan secara nyata yaitu melalui diplomasi, keahlian dan kecerdasan diplomasi dalam memperoleh dan mengolah data di lapangan menjadi keahlian khusus yang harus dimiliki, karena itulah Politik Luar Negeri dapat dikatakan sebagai substansi sementara Diplomasi merupakan Metodenya di dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara (Roy, 1991).

Konsep mengenai politik luar negeri pada dasarnya memiliki kebutuhan berbeda begitu pula dengan konsep politik luar negeri Indonesia, karena perumusan akan politik luar negeri berangkat dari mekanisme dan dinamika lingkungan eksternal negara yang mempengaruhi kepentingan nasional yang ingin dicapai. Doktrin yang paling mudah dipahami dalam politik luar negeri Indonesia sendiri adalah bebas dan aktif dimana bebas dan aktif sendiri dapat diartikan sebagai bentuk netralitas dan perjuangan Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Namun dalam kerangka teoritis penelitian ini, konsep mengenai politik luar negeri Indonesia berangkat dari RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025. Dimana dalam peranannya di dunia Internasional maka Indonesia dalam Politik Luar Negerinya tetap memegang prinsip Bebas&Aktif, disertai dengan peningkatan stabilitas keamanan regional melalui diplomasi, membentuk fungsi ASEAN menjadi lebih luas dan solid dalam bidang politik-budaya-keamanan, dan mendorong perdamaian secara universal di dunia. Dinamika politik internasional disertai dengan

pengaruh perluasan globalisasi mengharuskan Indonesia menentukan kepentingan nasionalnya untuk memperhatikan pengembangan kehidupan politik lebih demokratis serta perkembangan pasar yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional, penentuan kebijakan melalui politik luar negeri pada akhirnya tidak hanya bersandar pada dinamika politik internasional melainkan sudah menyangkut aspek lain secara domestik (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017)

2.3.3. Diplomasi

Definisi mengenai diplomasi sendiri ada banyak macamnya dan bahkan cukup sulit untuk menentukan batas batas tentang definisi suatu diplomasi, akan tetapi diplomasi dalam buku yang ditulis S. L. Roy menjelaskan bahwa definisi dari diplomasi adalah sebagai berikut,

...diplomasi, yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan tujuannya.

Dalam penjelasannya mengenai definisi diplomasi, Roy menjelaskan bahwa diplomasi akan selalu berkaitan dengan proses dalam bernegosiasi yang mana negosiasi tersebut bertujuan mencapai kepentingan suatu negara (Roy, 1991). Langkah lebih lanjut setelah negosiasi adalah tindakan diplomatik yang mana tindakan diplomatik tersebut memiliki dua kemungkinan baik itu bermakna positif seperti tercapainya kepentingan nasional suatu negara, atau bermakna negative berupa rusaknya hubungan perdamaian. Berikutnya agar terhindar dari potensi rusaknya hubungan perdamaian maka diperlukan adanya teknik atau metode dalam berdiplomasi

meskipun hasil akhir dari teknik atau metode tersebut berujung pada siasat perang apabila diplomasi berujung pada rusaknya hubungan perdamaian. Politik luar negeri tidak bisa dilepaskan dari adanya diplomasi, ini dikarenakan diplomasi erat kaitannya dengan keberadaan sistem suatu negara beserta para perwakilan negaranya.

Dalam pemaparan mengenai definisi diplomasi menurut Roy dijelaskan bahwa diplomasi merupakan cerminan tindakan dari suatu negara terhadap negara lainnya, tindakan yang diambil dapat berujung pada pencapaian kepentingan nasional ataupun rusaknya hubungan perdamaian. Selain Roy, ada pakar lain yang berusaha menjelaskan definisi dari Diplomasi salah satunya adalah *The Oxford English Dictionary* yang menjelaskan bahwa diplomasi adalah, “*manajemen hubungan internasional melalui negosiasi: yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil: bisnis atau seni para diplomat*”.

Pendapat lain mengenai definisi diplomasi diungkapkan oleh Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* yang menjelaskan definisi mengenai diplomasi yaitu, “*the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states.* (penerapan kecerdasan dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara negara berdaulat).”

2.3.4. Pendidikan Vokasi Indonesia

Secara teoritis, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menekankan kepada penguasaan atau keahlian pada salah satu bidang tertentu yang beorientasi pada dunia kerja. Pendidikan vokasi sendiri dalam penerapannya berbeda dengan pendidikan akademik pada umumnya, ini karena porsi secara praktik lebih besar dibandingkan secara teori (Harususilo, 2019).

Pendidikan vokasi sendiri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan atau keahlian di bidang tertentu menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja atau penyedia lapangan kerja. Pendidikan vokasi dan penguasaan akan teknologi adalah dua hal yang tidak dipisahkan dari pendidikan vokasi, ini dikarenakan pendidikan vokasi menuntut kemampuan dari para peserta didiknya untuk mampu terus berkembang dan belajar sepanjang hidupnya sebagai bagian dari tujuan pendidikan vokasi yaitu penguasaan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam dunia kerja maupun industri sudah menjadi hal yang umum dan harus dikuasai oleh tiap tenaga kerja karena tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas pada penguasaan teknologi akan berakibat pada melemahnya daya saing sumber daya manusia yang mana mayoritas industri maupun dunia kerja sudah mulai menerapkan komputerasi yang presisi, efektif, dan efisien (Kartini, 2012).

Selain memiliki tujuan sebagai penyediaan tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, pendidikan vokasi sendiri turut berperan dalam pengembangan karir ataupun pekerjaan dari seorang individu. Hal ini dikarenakan pendidikan vokasi berusaha untuk membangun kesadaran karir atau pekerjaan dari individu, yang mana karir ini akan berkembang apabila pendidikan yang dijalani sebelumnya terintegrasi dan sesuai dengan apa yang di minati oleh suatu individu. Hasil akhirnya adalah tahap eksplorasi atau pengembangan diri lebih jauh terhadap kemampuan khusus atau spesialisasi keahlian di bidang pekerjaan tertentu (Kartini, 2012).

Penggunaan istilah untuk pendidikan vokasi dalam literatur secara internasional tidak dapat ditemukan kecuali penggunaannya di Indonesia, istilah yang umum dipakai

pada literatur internasional biasanya adalah pendidikan vokasional bukan pendidikan vokasi. Karena istilah pendidikan vokasional secara teori merupakan pendidikan yang berupaya untuk mengembangkan “Vokasi” atau bidang keahlian pada bidang kerja tertentu. Maka melalui pemahaman mengenai pendidikan vokasi melalui kata kerja yakni “Vokasi”, maka dapat diketahui bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu yang mengharuskan peserta didik memahami jenis jenis perintah kerja melalui penugasan kerja ataupun jabatan kerja. Apabila dilakukan perbandingan antara istilah *pendidikan vokasi* dengan *pendidikan vokasional*, maka pendidikan vokasi merupakan sebagian kecil dari pendidikan vokasional. Hal ini dikarenakan secara konsep pendidikan vokasional akan terus melakukan pengembangan terhadap sifat, karakteristik, serta metodologi yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan mengikuti perubahan dan perkembangan zaman maupun teknologi (Sudira, 2017).

2.3.5. TVET (Technical & Vocational Education and Training)

TVET merupakan sistem pendidikan vokasi yang mana dalam pembelajarannya memiliki indikator serta tujuan yang jelas disertai dengan kompetensi pencapaian yang terukur. TVET sendiri berbeda dengan pendidikan vokasi pada umumnya karena dalam praktiknya membutuhkan dukungan sumber daya baik itu secara sumber daya manusia maupun alat praktik di lapangan. Pembelajaran TVET tidak hanya sekedar pada pemenuhan lulusan yang memiliki keahlian khusus atau spesialisasi pada bidang pekerjaan akan tetapi juga mengarah kepada lulusan yang memiliki dampak nyata baik di lingkungan kerja maupun lingkungan kehidupan

sekitarnya baik itu pada kehidupan secara ekonomi, sosial, maupun perkembangan teknologi (E-SMK, 2016)

Penerapan TVET sendiri tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat, bagi sebagian masyarakat pendidikan vokasi maupun TVET dianggap sebelah mata karena pendidikan ini erat kaitannya dengan kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang mampu terlebih masih banyaknya lulusan yang sulit mendapat kerja karena kebutuhan ataupun kualifikasi di suatu pekerjaan membutuhkan status pendidikan tinggi yang mana ini tidak dapat terjadi pada pendidikan vokasi maupun TVET. Namun hal yang berbeda terjadi di negara Jerman, yang mana pendidikan TVET negara ini menekankan peserta didiknya untuk turut merasakan menjadi bagian dalam suatu industri melalui kegiatan magang maupun *internship*, rasio yang digunakan untuk pembelajaran di dalam ruangan dengan praktik di lapangan atau industri sebesar 30%:70% dan pembelajaran praktik di lapangan ini di damping oleh tenaga ahli yang telah tersertifikasi (Ratnata, 2012).

2.4. Hipotesis Penelitian

Dalam pemaparan yang telah penulis lakukan, maka penulis memiliki asumsi utama yaitu, “*Dengan adanya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia-Jerman dalam ‘Indonesia-German Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility’ atau Deklarasi Jakarta 2012, maka mutu Pendidikan Vokasi di Indonesia akan meningkat melalui sistem pendidikan vokasi ganda yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan tenaga kerja dari lulusan SMK maupun pendidikan vokasi*”.

2.5. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan verifikasi atau pembuktian mengenai hipotesis yang telah diambil, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar hipotesis yang telah diambil dapat di verifikasi dengan menggunakan kerangka teoritik sebagai tolak ukur. Untuk verifikasi variabel dan indikator akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam bentuk table berikut,

Tabel 2. 1. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Konsep Analisa
Variabel Bebas: Dengan adanya “Indonesia-German <i>Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility</i> ” atau dikenal dengan Deklarasi Jakarta 2012 sebagai implementasi penguatan hubungan bilateral.	Hubungan bilateral melalui kemitraan komprehensif Deklarasi Jakarta 2012	Dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman di tanda tangani Deklarasi Jakarta sebagai bentuk kemitraan strategis yang di dalamnya terbagi atas 5+3 bidang utama kerja sama, bidang kerja sama tersebut adalah Investasi & Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan, Riset & Teknologi, dan Pertahanan sebagai 5 bidang kerja sama utama. Untuk 3 bidang kerja sama lainnya terdapat <i>Food Security</i> , Energi Terbarukan, dan Transportasi (prioritas Transportasi Laut).

<p>Variabel Terikat: Maka peningkatan mutu pendidikan vokasi di Indonesia dapat tercapai melalui sistem pendidikan vokasi ganda atau dikenal dengan istilah TVET (Technical & Vocational, Education, and Training)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. • Pelaksanaan Program SED-TVET (Sustainable Economic Development – Technical Vocational and Education and Training) 	<p>Melalui instruksi presiden yang dikeluarkan pada 9 September 2016, aturan tersebut dikeluarkan dan diberikan tugas khusus kepada Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dan para Gubernur. Menteri Kabinet Kerja yang termasuk dalam instruksi tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan • Menteri Ketenagakerjaan • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi • Menteri Perindustrian • Menteri Perhubungan • Menteri Kelautan dan Perikanan • Menteri BUMN • Menteri Keuangan • Menteri ESDM • Menteri Kesehatan • BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
--	---	--

2.6. Skema dan Alur Penelitian

Bagan 2. 2. Skema dan Alur Penelitian



